

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN UMKM KECAMATAN PRINGSEWU**

**Achmad Suharyo<sup>1</sup>, Sukismanto Aji<sup>2</sup>, Suci Asfarani<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung,  
Indonesia.

Email:

[suharyo@ubl.ac.id](mailto:suharyo@ubl.ac.id)

[sukismanto@ubl.ac.id](mailto:sukismanto@ubl.ac.id)

[suci.201418056@ubl.ac.id](mailto:suci.201418056@ubl.ac.id)

### **ABSTRAK**

Fenomena aspek perekonomian negara maupun daerah selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak ada habisnya dimana kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin mendesak sementara kemampuan ekonomi menurun dan melemah, untuk itu dalam rangka perwujudan sistem manajerial pemerintah dalam program pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui secara jelas Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pringsewu sekaligus mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat dalam implementasi program tersebut, dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian Kualitatif sebagai upaya menggambarkan secara jelas mengenai fokus penelitian. Hasil dari penelitian yang telah terlaksana dapat diketahui bahwa komunikasi dalam penyaluran KUR sudah tepat sasaran dalam penerimaan, kemudian sumberdaya yang dimiliki dirasa cukup, dalam aspek disposisi pelayanan dirasa masih kurang cepat dan berbelit-belit dan aspek birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah berjalan dengan cukup baik kendati masih terdapat beberapa indikator yang membuat Implementasi berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Program KUR, UMKM

### **Pendahuluan**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kemudian disebut UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memngembangkan perekonomian Indonesia, sebagian besar pelakon umkm berfungsi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan perkembangan UMKM juga tidak terlepas dari dorongan pemerintah Indonesia, menurut Kartajaya dalam Wibowo (2015) kompetensi perekonomian saat ini baik regional maupun global secara otomatis menyebabkan tingkat kompetensi meningkat. Kemudian menurut Suharjo (2020) pemanfaatan teknologi pada UMKM mengijinkan owner dalam usaha mendapatkan data secara rinci mengenai sikap, konsumen, serta pola belanja konsumen dan data tersebut sangat berarti untuk memastikan harga, promosi, serta pengembangan produk. Hal ini juga didukung oleh pendapat Lubis(2021) yang mengatakan pemanfaatan teknologi diharapkan bisa membagikan khasiat yang besar untuk dunia bisnis yang kompetitif. Industri yang sanggup bersaing dalam

persaingan dan mengimplementasikan teknologi sebagai perwujudan pelaksanaan teknologi dalam tingkatan persaingan bisnis dengan menggunakan electronic commerce ialah memasarkan bermacam berbagai produk ataupun jasa-jasa baik dalam bentuk wujud maupun digital.

Sejak November 2007 pemerintah telah memberlakukan program pemberian kredit yang kemudian dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro dan kecil tertuang dalam Instruksi Presiden No 6 Tahun 2007. Dari adanya peraturan tersebut merupakan bentuk kesadaran dari pemerintah mengenai hambatan dalam akses permodalan usaha yang tentu membutuhkan langkah-langkah strategis sehingga elemen penting sebagai pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan melalui akses permodalan dan meningkatkan peran usaha kecil dalam peningkatan pendapatan kelompok masyarakat bawah dan penciptaan kesempatan kerja. Ditengah area penduduk usaha Kecil Menengah (UMKM) yang sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang belum memiliki mata pencaharian sementara kebutuhan hidup saat ini terus bertambah namun sebaliknya pemasukan sangat kurang dari tingkat minimal standar hidup masyarakat dalam Redaputri (2021) disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memiliki pemikiran yang guna meningkatkan penjualan agar bisnis dapat bertahan di masa pandemic seperti saat ini, kemudian industry wajib mampu mengerahkan upaya agar menghasilkan keunggulan bersaing dalam jangka Panjang. Salah satu keunggulan kompetitif yang digunakan adalah kesanggupan dalam menempatkan produk ataupun jasanya dibenak konsumen dengan energi promise.

Industry wajib lebih kreatif serta inovatif dalam pengambilan kesempatan strategi pemasaran dimulai dari Kerjasama, kreatif, ikatan kreatif dengan konsumen dalam memberikan pelayanan prima baik model secara online maupun offline. Strategi pemasaran offline masih mendominasi warga di Indonesia hal ini disebabkan dari pola sikap verbal yang dapat diterima melalui komunikasi dan tercantum dalam penjualan, dikala berhubungan penutur serta mitra dapat memakai komunikasi verbal maupun nonverbal. Pemakaian Bahasa merupakan Sebagian mengaitkan bacaan dan konteks yang secara bertepatan. Menurut Lubis (2021) pemasaran pada era saat ini sangat variatif dan banyak memberikan warna baru bagi pemasaran di Indonesia bersamaan dengan revolusi 4.0 yang berlaku juga secara global, tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengenali strategi pemasaran yang ada di UMKM Pringsewu.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Implementasi Kebijakan**

Untuk dapat mencapai suatu tujuan dibutuhkan masukan-masukan dalam suatu kebijakan yang memuat proses dari tujuan yang diinginkan, menurut Gordon dalam Gobel (2017) Implementasi merupakan pengarahan kegiatan guna merealisasikan suatu program dimana terdapat seorang administrator yang berfungsi untuk mengkoordinir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan atau program yang sudah dipilih. Dalam hal ini mengkoordinir adalah bentuk pengaturan sumberdaya, unit-unit dan metode pelaksanaan program, sementara interpretasi merupakan penerjemahan istilah program kedalam rencana dan petunjuk yang diterima secara fleksibel kemudian menerapkan yaitu penerapan atau penggunaan pelayanan secara rutin sebagaimana mestinya. Purnomo (2021) mengatakan pelaksanaan kebijakan yang optimal merupakan suatu konsekuensi dari penerapan kebijakan yang menuntut eksistensi dari kebijakan dan pelaksana kebijakan. Sementara Suharyo (2020) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan krusial yang dibuat sebagai proses dalam suatu program dan harus diimplementasi atau dilaksanakan untuk mengetahui dampak dan pencapaian tujuan yang diinginkan, implementasi dilaksanakan oleh pemerintah dengan sedikit banyak melibatkan birokrat untuk dapat memenuhi tugasnya dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward dalam Dharma (2016) merupakan suatu ketetapan yang secara jelas tertuang dalam bentuk peraturan atau undang-undang, pidato pejabat, atau program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian menurut Agustino dalam Mulyana (2020) implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai tujuan jika memiliki aspek monitoring dan evaluasi guna mempelajari harapan dan mengendalikan pelaksanaan program kebijakan serta mengetahui respon masyarakat akan pelaksanaan kebijakan yang berjalan, secara konseptual implementasi dapat dikatakan sebagai proses yang diikuti dengan penentuan tindakan yang diambil guna mencapai tujuan. Pada hakikatnya implementasi merupakan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan.

### **Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat yang kemudian disebut KUR merupakan program yang dibuat oleh pemerintah sebagai rangka mengupayakan penguatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kemudian disebut UMKM. KUR memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, penyediaan KUR bagi UMKM berbentuk pemberian biaya melalui penyaluran dana yang disediakan bagi kebutuhan modal usaha atau investasi pada pelaku UMKM bagi individu maupun grup. Riawan (2018) menyebutkan bahwa KUR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha di sektor UMKM, hal yang sama juga disampaikan oleh Ulfa (2020) yang mengatakan KUR memiliki dampak yang positif terutama terhadap upaya pengembangan UKM dan UMKM juga memiliki dampak yang positif dalam penanggulangan kemiskinan.

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah yang kemudian disebut UMKM merupakan bentuk usaha yang populer dikalangan masyarakat sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dasar hukum UMKM tertuang dalam peraturan perundang-undangan No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UU UMKM) peraturan ini digunakan untuk mengatur kriteria modal usaha dan hasil penjualan pertahun guna mendaftarkan atau mendirikan kegiatan UMKM. Menurut Sarfiah (2019) UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan perannya yang strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebab UMKM terbukti memberikan peluang terhadap peningkatan Ekonomi sebab mampu menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi. Kemudian menurut Kadeni (2020) Peran UMKM sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana melalui UMKM masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk menghadapi beberapa situasi dan membuat pemerataan kesejahteraan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yang merupakan suatu kegiatan penelitian dengan menggunakan prosedur pengurutan data secara deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari seseorang yang diamati. Metode ini dipilih berdasarkan judul

yang berfokus pada Implementasi program dan merujuk pada data deskriptif, teknik penelitian ini menggunakan teknik studi kasus secara rinci mengenai objek tertentu, adapun objek dalam penelitian ini dilakukan di Bank BNI Pringsewu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat melalui aspek-aspek Implementasi menurut Edward III berupa Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan Birokrasi. Kur adalah kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengakses pembiayaan, penjaminan KUR dijamin oleh kementerian Keuangan bersama dengan perusahaan terjamin untuk melaksanakan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama.

#### **a. Analisis Komunikasi**

Dalam pelaksanaan kebijakan program KUR strategi komunikasi telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program KUR guna menunjang Kesejahteraan target sasaran KUR. Strategi tersebut dicapai melalui pendekatan kepada masyarakat umum serta masyarakat yang bersangkutan atau orang yang berkepentingan dalam program KUR, Menurut Hasil Wawancara dengan Pimpinan Bank KCP BNI Pringsewu, beliau mengatakan:

*Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Program KUR ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki usaha atau yang ingin berusaha dalam bidang kewirausahaan dan membentuk UMKM bersama dengan pihak Bank selaku Penyalur dana KUR. Guna mencegah ketidaktepatan Penyaluran dana KUR. (Hasil Wawancara Desember 2022)*

Penggunaan dana KUR yang disalurkan oleh beberapa bank penyalur dana KUR sudah sesuai dengan anjuran kebijakan yang dibuat untuk pelaku usaha, akan tetapi dalam pengawasan mengenai dana yang sudah disalurkan masih kurang baik dan menyebabkan penyaluran dana menjadi kurang tepat selain itu dalam hal ini Pemerintah daerah juga sangat enggan bahkan minim dalam memberikan pengawasan program KUR sementara KUR sendiri merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah pusat guna meratakan kesejahteraan masyarakat baik pusat maupun daerah.

#### **b. Analisis Sumberdaya**

Pelaksanaan Program KUR aspek sumberdaya merupakan hal yang sangat berperan penting dalam membantu pelaksanaan program meskipun pada kenyataannya belum tercapai dengan cukup maksimal, hal ini terlihat dari hasil temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksana teknis program KUR yang belum memahami pelaksanaan program, Penerapan Program KUR di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat memberi perubahan kearah yang lebih baik akan tetapi menurut hasil wawancara dengan Pimpinan BNI KCP Pringsewu, beliau mengatakan:

*Saat ini penerapan program KUR masih belum memberikan dampak perubahan yang signifikan dimana perubahan hanya dirasakan oleh usaha-usaha yang telah menggunakan KUR dan hal itu pun belum keseluruhan, oleh karena itu kami selaku Bank Penyalur berupaya untuk lebih menggerakkan UMKM melalui Program KUR, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berwirausaha namun belum*

*memiliki modal program KUR hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan usaha-usaha rakyat yang lebih produktif dalam naungan UMKM (Hasil Wawancara Desember 2022)*

Dari hasil wawancara tersebut dan didukung dengan temuan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan Program KUR telah berupaya dengan baik akan tetapi hal tersebut belum cukup dalam melaksanakan pelayanan program KUR dengan Maksimal pada masyarakat.

### **c. Analisis Disposisi**

Pelaksanaan kebijakan program Penyaluran Dana KUR di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari aspek disposisi pelaksana yang memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan, disposisi dalam pelaksanaan Program KUR diketahui memiliki peran sebagai pelaksana program yang profesional dan mampu melaksanakan program KUR dengan baik sesuai dengan syarat utama selaku implementor program KUR di Pringsewu. Menurut hasil Wawancara dengan pimpinan Bank BNI Pringsewu, beliau mengatakan:

*Mengingat Program KUR in adalah program yang dikhususkan sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kami merupakan salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam penyaluran dana tersebut di kabupaten Pringsewu maka kami selalu menanamkan kepada para pegawai untuk melaksanakan pelayanan dengan ramah, ikhlas dan bekerja dengan penuh rasa peduli yang tinggi. (Hasil Wawancara Desember 2022)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sikap dari para pelaksana kebijakan mendagri syarat utama pelaksanaan kebijakan di lapangan. Program penyaluran KUR dalam pengembangan Usaha Rakyat oleh pemerintah dengan cara membangun Kerjasama dengan Bank merupakan suatu langkah baru yang dianggap positif sebab dengan adanya Kerjasama dengan Bank Program KUR dapat lebih dengan baik disosialisasikan dan dapat mendorong spekulasi masyarakat bahwa komitmen pemerintah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah Sudah berjalan dengan cukup baik.

### **d. Analisis Struktur Birokrasi**

Penerapan program KUR sangat diharapkan mampu membawa perubahan bagi pelaku UMKM, untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengawasan menurut Hasil Wawancara dengan Pimpinan BNI KCP Pringsewu, beliau mengatakan:

*Untuk membantu menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan program KUR kami menerapkan sistem NPL (Non Performing Loan), kemudian kami juga melakukan pengecekan, pembinaan, dan pengawasan terhadap debitur KUR dan kami juga selalu siap dalam melaksanakan pelayanan KUR dengan Sumberdaya yang sudah memadai hal tersebut juga merupakan bentuk upaya Bank BNI dalam membantu pemerintah mengembangkan sektor Riil dan pemberdayaan UMKM terutama bagi masyarakat yang berminat dalam bidang wirausaha. (Hasil wawancara Desember 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KUR peran sebagai pendanaan modal UMKM di Kabupaten Pringsewu oleh Bank

BNI KCP Pringsewu sudah berjalan dengan baik dimana birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik melalui pengecekan, pembinaan, dan pengawasan secara rutin kepada debitur.

**e. Aspek Penghambat dalam Implementasi Program**

Aspek penghambat dalam Implementasi Program KUR adalah rumitnya pengajuan KUR yang rumi dan masih berbelit-belit, dan tidak semua Bank menjadi rekan kerja dalam penyaluran KUR, kemudian penegakan kebijakan mengenai UKM dirasa masih kurang efektif, serta belum tearahnya penggunaan program KUR dalam UMKM.

**f. Aspek Pendukung Implementasi Kebijakan KUR Terhadap Target Sasaran**

Dengan adanya program KUR percepatan Pengembangan Sektor Riil dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik, selain itu KUR juga memberikan dampak positif dalam memajukan UMKM di sektor daerah, dan dengan adanya KUR yang mendorong UMKM maka peluang usaha dan peluang kerja di daerah juga meningkat hal ini juga tentu akan berdampak pada pembangunan yang ada di daerah.

**Kesimpulan**

Tujuan utama dari program KUR adalah meningkatkan Usaha-usaha sektor riil melalui pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, dari hasil riset dapat diketahui bahwa komunikasi Penyaluran KUR sudah tepat sasaran namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang menyebabkan Program KUR tidak tersalurkan secara tepat saran, kemudian dalam sumberdaya Program KUR di Pringsewu dilaksanakan melalui sosialisasi dan KCP BNI Pringsewu memiliki peran sebagai penyalur KUR guna mendorong perkembangan Ekonomi UMKM daerah Pringsewu, kemudian Disposisi proses pengajuan program KUR di KCP BNI masih terkesan berbelit-belit akan tetapi penyaluran Program KUR ini sangat membantu dan menjadi solusi bagi UMKM dalam mengembangkan Usaha. Dalam aspek birokrasi, masih dibutuhkan beberapa langkah yang harus lebih diefektifkan sebagai penunjang pelaksanaan Program UMKM di Kabupaten Pringsewu.

**Daftar Pustaka**

- Achmad Suharyo & Siti Khomiyati. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung* 6 (2), 1-12.
- Adi Dharma, B. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kur Mikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. In *dkk / Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 6, Issue 1).
- Agnes Firanti Ekel. 2020. Abstrak. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik E-Journal. Vol 6 (92)*
- Aristanto, E. (2019.). *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia.. Jurnal Keuangan dan Perbankan FEB Universitas Merdeka Malang.*
- Eko Purnomo, & Muhamad Oktavianur. 2021. *Implementasi Kebijakan Pembelajaran Program Paket C Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bangsa 1 Kota Bandar Lampung).* 7(3) 29-40.

- Kade Ni, Nini Srinjani. 2020. *Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Equilibrium. Vol 8 (2).
- Khalid, A., & Pandipa, H. (2015). Implementasi Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Unit Mapane. In *Jurnal Ilmiah Administratie*.
- Lubis, T., Setia, E., Amalia, Halimatusakdiah, & Abus, N. A. A. (2021). Marketing Strategy through E-Commerce at UMKM Queen Burger and Snack. *Abdiformatika*, 1(2), 68–74. <https://doi.org/10.25008/abdiformatika.v1i2>
- Malik, M. M., Lukiana, N., & Taufik, M. (2020). Implementation of Marketing Strategies To Increase Competitiveness in Umkm. *Proceedings Progress Conference*, 3(1), 241–248.
- Maria Ulfa, Mohamad Mulyadi. 2020. *Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan di Kota Makassar*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol 11 (1)
- Mohammad Gobel. 2020. *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia Unit Bahu Manado*. (n.d.). Journal, I., Reviewed, P., & Vol-, I. J. (2020). 2,3,4,5. (3), 1–8.
- Mulyana, Y., Rosid, A. (2020.). *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada Umkm Di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Fisip Universitas Pasundan.
- Riawan. 2018. *Pengaruh Modal Kecil Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Pelatihan Kidul Kec. Siman)*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol.19 (01).
- Starfish. 2019. *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan. Vol 4 (2).
- Tamara, A. (n.d.). *Analisis Implementasi ( Tamara)* 395. 395–406.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). *Jurnal Strategi dan Program Pemasaran*.